

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertumbuhan Baru (Pertumbuhan Endogen)

Menurut Barro dan Martin (1995) dalam Saputri (2014), Pada tahun 1980an muncul teori baru tentang pertumbuhan, teori baru tersebut dipelopori oleh Paul Romer yang teorinya tersebut dikenal dengan nama teori endogen. Latar belakang pemikiran dari Romer ini muncul dikarenakan ia merasa tidak puas dengan teori pertumbuhan secara eksogen. Akibat dari ketidakpuasan yang dirasakan oleh Romer, dalam teorinya Romer menjadikan determinan pertumbuhan sebagai variabel endogen ke dalam model. Dimasukkannya faktor-faktor penentu dari pertumbuhan jangka panjang kedalam model, menjadikan pertumbuhan tersebut hingga saat ini dikenal sebagai pertumbuhan endogen (*endogenous growth*).

Terdapat dua prinsip penting dalam teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen), prinsip yang pertama adalah pada teori ini lebih fokus kepada bagian kapital manusia, antara lain seperti pengetahuan, keterampilan serta melatih individu. Kapital manusia dan pertumbuhan memiliki keterkaitan yang dimana ketika perekonomian membaik (lebih baik) mereka akan lebih condong untuk melakukan “*invest*” kepada masyarakat dengan nutrisi yang berkembang, sekolah dan *on the job training*. Di lain hal tenaga kerja yang lebih sehat serta lebih produktif,

mengarah kepada standar hidup yang berkembang. Prinsip yang kedua pada teori ini lebih menekankan terhadap adanya inovasi dibidang teknologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pribadi sebagai pemicu dalam pertumbuhan produktivitas. Singkatnya teori ini berkaitan dengan penekanan terhadap formasi kapital manusia, ketika pembangunan dan kegunaan inovasi teknologi memerlukan tenaga kerja yang terampil (Waluyo, 2002 dalam Winarti, 2014).

Teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) dapat dinyatakan dengan persamaan $Y = AK$. Dimana A mewakili teknologi dan K mewakili modal fisik dan sumber daya manusia. Asumsi yang dapat ditarik dari teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) yaitu bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia dapat menghasilkan ekonomi eksternal dan terciptanya peningkatan produktivitas yang dapat membalikan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah.

Di dalam teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) menyimpulkan bahwa investasi terhadap modal fisik dan modal manusia memiliki peran dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta mendorong peran aktif dari kebijakan publik dalam memacu pembangunan ekonomi melalui investasi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan pengaruhnya dalam perubahan konsumsi maupun pengeluaran untuk investasi publik serta penerimaan pajak (Todaro, 2006 dalam Winarti, 2014).

Menurut Mankiw (2006) dalam Winarti (2014) :

“Penganut teori endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan semakin menurun) lebih bermanfaat jika K diasumsikan secara lebih luas yaitu dengan memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Ilmu pengetahuan adalah input penting dalam produksi perekonomian baik produksi barang dan jasanya maupun produksi ilmu pengetahuan barunya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat selama beberapa abad terakhir membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang meningkat”.

Implikasi dari tabungan dan investasi pada modal manusia oleh teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) adalah tidak adanya kekuatan yang dapat menyamai tingkat pertumbuhan antarnegara, dan tingkat pertumbuhan nasional yang konstan dan berbeda antarnegara tergantung pada besarnya tabungan nasional dan tingkat teknologi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah sulitnya bagi negara yang mengalami miskin modal manusia dan fisik untuk menyamai tingkat pendapatan per kapita dari negara yang kaya kapital, meskipun tingkat tabungan nasionalnya sama besar.

Seperti yang dikemukakan oleh teori Neo-Klasik (*beyond the solow model*), menegaskan pentingnya transformasi pembangunan yang baik tidak hanya sebatas dari adanya peningkatan efisiensi alokasi dan akumulasi faktor (C,L dan H). pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang penting menurut teori Neo-Klasik (*beyond the solow model*), teori ini menyimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya mampu meningkatkan faktor H, namun juga dapat meningkatkan wawasan faktor

H untuk dapat menerima suatu perubahan dan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi (Prasetyo, 2008 dalam Winarti, 2014).

David Romer sebagai pencetus teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) dalam modelnya terdapat akumulasi modal fisik, modal manusia dan pertumbuhan. Berikut model yang dibuat oleh Romer yang dimana *outputnya* menyerupai model solow dengan fungsi :

$$Y(t) = K(t)^\alpha H(t)^\beta [A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta}$$

Dimana :

K = Modal fisik

H = Sumber daya manusia (*Human capital*)

A = Perkembangan teknologi

L = Tenaga kerja

2. Teori Modal Manusia (*Human Capital*)

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan, tolak ukur keberhasilan dari proses pembangunan tersebut ditentukan dari indikator pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan ukuran perkembangan *output* dari suatu wilayah selama periode tertentu, sedangkan *output* tersebut menunjukkan produktivitas suatu wilayah akibat adanya kegiatan investasi yang dilakukan. Keputusan melakukan investasi diharapkan dapat memberikan pengembalian yang lebih besar dari biaya investasi yang telah dikeluarkan.

Pada umumnya investasi dilakukan dalam bentuk investasi fisik dan finansial di bidang usaha. Investasi dilakukan dengan mengorbankan pengeluaran pada saat ini untuk memperoleh suatu yang lebih besar di masa mendatang. Tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik, modal, maupun finansial di bidang usaha saja, investasi dapat dilakukan di bidang sumber daya manusia juga. Investasi di bidang sumber daya ini dilakukan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) yang dimana akan memberikan imbalan berupa penghasilan yang lebih besar di masa mendatang.

Seperti investasi pada umumnya yang dilakukan di bidang usaha, investasi juga dilakukan di bidang sumber daya manusia. Dalam investasi di bidang sumber daya manusia terdapat pengorbanan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan selama proses investasi dilakukan. Tentu imbalan penghasilan yang akan diterima akan lebih tinggi dari sebelumnya untuk mampu mencapai tingkat pengeluaran yang tinggi juga. Kegiatan investasi tersebut dinamakan *human capital*. Investasi ini dilakukan dalam hal pendidikan dan latihan, migrasi, dan perbaikan gizi serta kesehatan (Simanjuntak, 1998 dalam Saputri, 2014).

Pada tahun 1961, Theodore W. Schultz pertama kali memperkenalkan teori modal manusia (*human capital*). Dalam teorinya Schultz menekankan bahwa manusia adalah suatu modal layaknya bentuk modal lainnya seperti mesin dan teknologi. Selain menekankan tentang hal tersebut, Schultz juga menegaskan bahwa pendidikan, pengetahuan,

kesehatan serta keterampilan merupakan bentuk dari modal manusia. Tentu investasi dalam modal sosial juga mendatangkan imbalan (penghasilan) dimasa mendatang sama seperti investasi dalam modal fisik. (Schultz, 1961 dalam Sari, 2014).

Menurut Becker (1993) dalam Sari (2014), bahwa manusia merupakan investasi yang menghasilkan pengembalian serta pengeluaran dan bukan semata-mata sebagai sumber daya saja, hal ini dilakukan untuk mengembangkan kualitas serta kuantitas dari manusia. Manusia akan memiliki suatu nilai tambah ketika pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dapat berguna. *Human capital* diukur dengan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Todaro (2000) dalam Sari (2014), melalui bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan investasi modal manusia. Kedua bidang ini memainkan peranan yang amat penting, pendidikan dapat menentukan kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi yang modern dan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu kesehatan merupakan hal penting dalam peningkatan produktivitas. Dapat disimpulkan pendidikan dan kesehatan merupakan unsur penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai *input* dari fungsi produksi agregat.

Pengembangan modal manusia memiliki beberapa faktor penting, diantaranya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut bisa menjadi suatu nilai tambah seorang pekerja untuk meningkatkan

produktivitasnya. Secara sederhana semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi juga kemungkinan penghasilan yang didapatkan. Investasi modal manusia dalam bidang pendidikan merupakan faktor penting, karena pendidikan dapat menciptakan modal manusia yang berkualitas dan dapat memberikan *multiplier effect* dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian suatu negara.

Disamping pendidikan dan latihan, kesehatan juga merupakan faktor penunjang pengembangan modal manusia. Kesehatan merupakan dasar dari produktivitas dan kapasitas dalam meningkatkan pendidikan. Tenaga kerja yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik akan lebih produktif dibanding yang tingkat kesehatannya rendah, semakin tinggi produktivitas yang dimiliki juga akan mendapatkan penghasilan yang semakin tinggi. Dapat disimpulkan kesehatan merupakan input penting bagi modal manusia dalam meningkatkan produktivitas.

Menurut Becker (1975) dalam Saputri (2014), jika pelatihan hanya diberikan di awal saja, pengeluaran pada saat tersebut akan sama dengan upah yang diterima ditambah dengan biaya pelatihan, dan pengeluaran pada waktu lain akan sama dengan upah saja, serta penerimaan pada waktu kapanpun akan sama dengan marjinal produk. Yang dapat dinyatakan dengan persamaan :

$$MP_0 + \sum_{t=1}^{n-1} \frac{MP_t}{(1+i)^t} = W_0 + k + \sum_{t=1}^{n-1} \frac{W_t}{(1+i)^t}$$

k merupakan biaya pelatihan. Jika kondisi di bawah ini didefinisikan :

$$G = \sum_{t=1}^{n-1} \frac{MP_t - W_t}{(1+i)^t}$$

maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut :

$$MP_0 + G = W_0 + k$$

k hanya mengukur biaya aktual pelatihan saja tanpa menghitung seluruh biaya pelatihan, dengan alasan tidak menyertakan waktu yang seseorang habiskan dalam melakukan pelatihan serta waktu yang telah dipakai untuk menghasilkan *output* sekarang. Perbedaan antara apa yang mungkin dihasilkan, MP_0' dengan apa yang dihasilkan, MP_0 adalah biaya kesempatan (*opportunity costs*) dari waktu yang dihabiskan selama pelatihan.

Jika C adalah jumlah biaya pelatihan dengan *opportunity costs*, maka persamaan menjadi :

$$MP_0' + G = W_0 + C$$

G merupakan selisih antara penerimaan sekarang dengan biaya mendatang, yang merupakan ukuran pengembalian dari penyediaan kegiatan pelatihan, maka G dan C terdapat perbedaan, yaitu mengukur perbedaan antara imbalan dan pengeluaran dari adanya kegiatan pelatihan. Dari persamaan tersebut menyebutkan bahwa marjinal produk akan sama dengan upah pada waktu awal dengan catatan jika imbalan sama dengan biaya, yaitu G sama dengan C . marjinal produk akan lebih besar daripada upah saat pengembalian, G lebih kecil dari biaya, C . Sebaliknya marjinal produk akan lebih kecil dari upah ketika imbalan investasi, G lebih besar dari biaya, C .

Pendapat Becker, marginal produk (MP_t) dan tingkat upah (W_t) dicapai pada jumlah yang sama sehingga $G = 0$. Sehingga persamaan menjadi :

$$MP'_0 = W_0 + C$$

atau

$$W_0 = MP'_0 - C$$

dan dalam kondisi sebenarnya menjadi,

$$W_0 = MP_0 - k$$

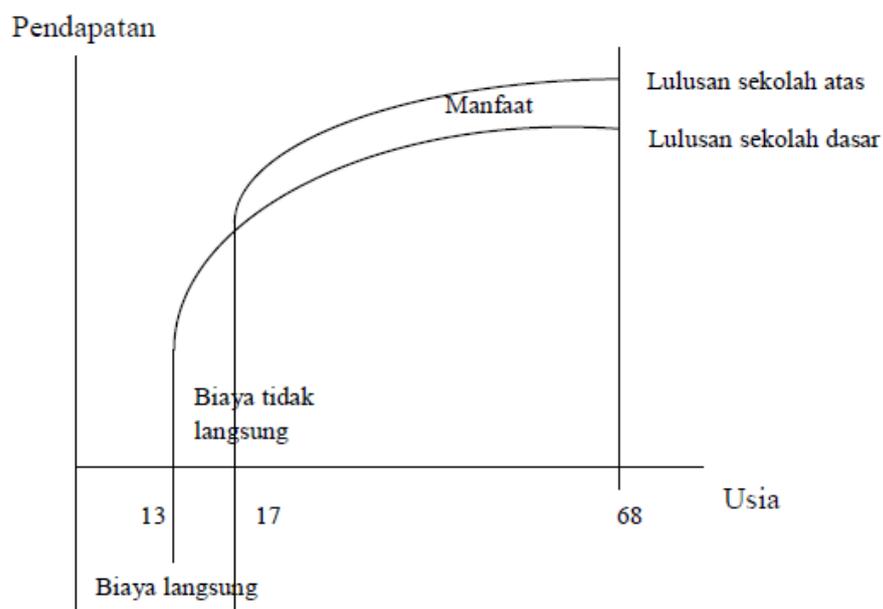
Maka dapat disimpulkan upah tidak sama dengan marginal produk atau lebih kecil dari total biaya pelatihan. Singkatnya pekerja akan membayar biaya pelatihan dengan menerima upah dibawah produktivitas mereka sekarang.

Menurut Becker (1975) dalam Saputri (2014) :

“Bahwa penggabungan antara catatan pendapatan dan modal akan membuat pendapatan siswa yang dilaporkan rendah dan mungkin negatif, meskipun pendapatan jangka panjang mereka di atas rata-rata. Selama sebagian orang-orang muda menerima pelatihan dan selama siswa pelatihan cenderung menerima pendapatan yang lebih rendah saat ini serta lebih tinggi di masa datang, korelasi antara pengeluaran saat ini dengan penerimaan saat ini tidak hanya lebih lemah dari korelasi dengan penerimaan jangka panjang, tetapi juga tanda dari korelasi tersebut mungkin berbeda”.

Gambar 2.1 menerangkan skema *trade-off* dalam keputusan melanjutkan sekolah. Diasumsikan seseorang bekerja setelah lulus sekolah sampai ia tidak mampu bekerja lagi atau meninggal. Perkiraan ini diambil dari tingkat harapan hidup dunia saat ini, yaitu 66 tahun. Dua gambaran golongan pencari nafkah yang ditampilkan adalah sebagai berikut, yaitu

orang yang lulus pendidikan dasar tetapi tidak melanjutkan ke pendidikan tingkat atas, dan orang yang lulus pendidikan tingkat atas (atau pendidikan sekunder) namun tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Lulusan sekolah dasar diasumsikan mulai bekerja pada usia 13, dan lulusan sekolah tingkat atas diasumsikan mulai bekerja pada umur 17.



Sumber :*Todaro dan Smith dalam Saputri (2014)*

Gambar 2.1

Hubungan antara Pendapatan dan Keputusan Melanjutkan Sekolah

Di negara berkembang, seseorang yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat atas akan mengorbankan empat tahun pendapatan yang tidak akan diperolehnya karena keputusannya memilih bersekolah. Hal ini merupakan biaya tidak langsung, seperti yang terdapat pada **Gambar 2.1** orang tersebut bisa saja memutuskan untuk bekerja paruh waktu, tetapi kemungkinan tersebut diabaikan disini agar lebih sederhana.

Jika orang tersebut bekerja paruh waktu, maka hanya sebagian dari daerah biaya tidak langsung yang berlaku. Selain itu juga terdapat biaya langsung seperti biaya sekolah, buku-buku, dan pengeluaran lain yang tidak akan dikeluarkan jika orang tersebut tidak melanjutkan sekolah setelah ia lulus dari sekolah dasar. Selama sisa hidupnya, dia akan memperoleh penghasilan yang lebih besar setiap tahunnya daripada jika ia bekerja dengan berbekal ijazah SD saja. Perbedaan ini disebut “Manfaat” pada **Gambar 2.1** (Todaro dan Smith, 2006 dalam Saputri, 2014).

3. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Pembangunan Manusia

Konsep Pembangunan Manusia (*Human Development*) sebagai paradigma pembangunan model baru pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dalam *Human Development Report*. Definisi pembangunan manusia menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah memperluas pilihan bagi manusia, yang dapat dilihat dari usaha kearah perluasan pilihan, dan sebagai taraf yang dicapai dalam upaya tersebut. Pembangunan manusia juga dapat diartikan sebagai pembangunan kemampuan manusia dengan jalan peningkatan kesehatan, pengetahuan, serta keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan mereka.

Konsep penting dalam pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) (1995) adalah sebagai berikut :

- 1) Manusia sebagai pusat pembangunan.
- 2) Tujuan pembangunan sebagai perluasan pilihan bagi manusia dan tidak hanya fokus terhadap peningkatan pendapatan mereka saja tetapi pembangunan manusia secara komprehensif.
- 3) Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (kapasitas manusia) serta memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- 4) Empat pilar pokok pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia sebagai dasar dari tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Dalam *Human Development Report* (1995) *United Nations Development Programme* (UNDP) menegaskan bahwa dalam memperluas pilihan manusia, konsep pembangunan manusia dibangun dari empat unsur pokok, yaitu :

1. Produktivitas

Masyarakat harus mampu meningkatkan produktivitas serta ikut dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Maka pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan yang ada dalam hal ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada.

3. Kestinambungan

Akses dalam memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang saja tetapi juga untuk generasi yang mendatang. Semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi.

4. Pemberdayaan

Pembangunan dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu : kesehatan, pengetahuan dan hidup layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup; untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan

gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) (BPS, 2008 dalam Winarti, 2014).

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup serta Anak Masih Hidup. Semua negara telah menyepakati mengenai besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini. Usia 85 tahun dan 25 tahun merupakan angka tertinggi dan terendah sebagai batas atas dan batas bawah pada penghitungan indeks di komponen angka harapan hidup yang angka tersebut berdasarkan standar dari *United Nations Development Programme* (UNDP).

2) Tingkat Pendidikan

Dalam mengukur dimensi pendidikan penduduk menggunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf

lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Sesuai kesepakatan beberapa negara digunakan dua batasan untuk menghitung indeks pendidikan. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

3) Standar Hidup Layak

Dalam arti luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

c. Pembangunan Manusia dan Pengukurannya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu konstruksi pengukuran atas dasar konsep *right based approach to human development*.

IPM melakukan pengukuran rata-rata pencapaian setiap individu negara yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah :

1. Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) sejak waktu lahir (*life expectancy at birth*).
2. Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan.
3. Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator *purchasing power parity* (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika.

Berikut merupakan Rumus untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

X_1 = Indeks Harapan Hidup

X_2 = Indeks Pendidikan

X_3 = Indeks Standar Hidup Layak

Terlebih dahulu Masing-masing komponen tersebut dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i : I_i = \frac{X_i - \text{Min } X_i}{\text{Max } X_i - \text{Min } X_i} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

I_i = Indeks komponen IPM ke i dimana $I = 1,2,3$

X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

$\text{Max } X_i$ = Nilai Maksimum X_i

$\text{Min } X_i$ = Nilai Minimum X_i

4. Pengeluaran Pemerintah

a. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sukirno (2004) dalam Winarti (2014), bahwa sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, seperti membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan.

Pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

Menurut Dumairy (1999) ada empat peran yang dimiliki oleh Pemerintah, yaitu :

1) Peran Alokatif

Peran Alokatif merupakan peran dari pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya serta mendukung efisiensi produksi.

2) Peran Distributif

Peran Distributif, merupakan peran dari pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

3) Peran Stabilitatif

Peran Stabilitatif merupakan peran dari pemerintah untuk memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.

4) Peran Dinamisatif

Peran Dinamisatif merupakan peran dari pemerintah untuk menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Di negara maju terdapat empat jenis utama dari pengeluaran publik yaitu : pendidikan, infrastruktur, jaminan sosial dan

kesejahteraan, dan perawatan kesehatan. Empat bidang tersebut dipilih berdasarkan lima kriteria :

- 1) Mewakili komponen utama pengeluaran.
- 2) Melibatkan peran pemerintah pusat maupun daerah.
- 3) Memberikan pengaruh pada sejumlah besar rumah tangga atau masyarakat.
- 4) Menunjukkan tantangan kebijakan yang penting.
- 5) Bidang-bidang tersebut telah berada dalam agenda kebijakan publik selama dua dekade terakhir (Dumairy, 1999 dalam Winarti, 2014).

Menurut Sukirno (2004) dalam Winarti (2014) bahwa terdapat penentu-penentu dalam pengeluaran pemerintah yaitu :

- 1) Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Pemerintah dalam menyusun anggaran belanja harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, semakin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

- 2) Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Tujuan-tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat,

misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur dan mengembangkan pendidikan.

3) Pertimbangan politik dan keamanan

Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak (Sukirno, 2004 dalam Winarti, 2014).

b. Teori Pengeluaran Pemerintah

1) Adolph Wagner

Wagner menyatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Berdasarkan temuannya tersebut Wagner lalu menamakannya dengan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*).

Ada lima hal yang menurut Wagner menjadi penyebab pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah : (Dumairy, 1999 dalam Winarti, 2014)

1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan.

- 2) Kenaikan Tingkat pendapatan masyarakat.
 - 3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
 - 4) Perkembangan demokrasi.
 - 5) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.
- 2) Teori Rostow dan Musgrave

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana.

Pembangunan ekonomi pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya (Mangkoesebroto, 2001 dalam Winarti, 2014).

3) Teori Peacock Wiseman

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Peacock dan Wiseman memunculkan pendapat lain terkait menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah”. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang semakin besar.

Berdasarkan teori pemungutan suara (*voting*), masyarakat mempunyai batas toleransi terhadap pembayaran pajak, yaitu batas dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Batas toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara sewenang-wenang.

Peacock-Wiseman mengatakan bahwa pungutan pajak yang semakin meningkat disebabkan oleh perkembangan ekonomi, walaupun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, dan pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu, karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk dapat mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*).

Jika timbul efek penggantian dalam perekonomian pada saat terjadinya gangguan sosial, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Efek tersebut menegaskan bahwa gangguan sosial menimbulkan kesadaran terhadap masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika

penerimaan-pengeluaran pemerintah. (Mangkoesebroto, 2001 dalam Winarti, 2014).

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Penduduk adalah sejumlah manusia yang menempati suatu daerah / wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (*income per capita*) negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut (Subri, 2003 dalam Rosyetti, 2009).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang penting bagi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi (pendapatan perkapita) yang tinggi. Pelaksanaan pembangunan di suatu negara tidak terlepas dari peran serta penduduk. Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan penduduk yang berkualitas, sehingga tujuan pembangunan dapat dengan mudah dicapai. Oleh karena itu, kualitas penduduk selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Kualitas penduduk di suatu negara dapat dilihat dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu : kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.

Penduduk yang terus bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertumbuhan tersebut memungkinkan suatu negara untuk menambah produksi. Disamping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan,

dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk akan selalu bertambah tinggi, maka produktivitas akan bertambah, dan ini selanjutnya akan mendorong pertambahan jumlah produksi.

Dalam teori penduduk, Thommas Robert Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan (Mantra, 2000 dalam Rosyetti, 2009). Selanjutnya Malthus sangat prihatin bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh penduduk untuk berlipat dua jumlahnya sangat pendek, ia melukiskan bahwa apabila tidak dilakukan pembatasan, penduduk cenderung berkembang menurut deret ukur. Sehingga, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan bahan pangan (Mantra, 2000 dalam Rosyetti, 2009).

Pendapat Malthus tersebut mendapat tentangan dari Michael Thomas Sadler yang mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada disuatu negara atau wilayah. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun. Sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, maka daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia (Mantra, 2000 dalam Rosyetti, 2009).

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Lincolin akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan

kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas (Arsyad, 2004 dalam Rosyetti, 2009).

Dalam bukunya *Principles of Political Economy*, Malthus menganalisa pertumbuhan penduduk dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan (Jhingan, 2004 dalam Rosyetti, 2009).

Bagi negara-negara sedang berkembang, perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk. Jadi karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Jika penduduk tidak dapat memperoleh pekerjaan, yang berarti mereka itu menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Suparmoko, 1999 dalam Rosyetti, 2009).

Penduduk yang meningkat dengan cepat menyebabkan permintaan akan sandang, pangan, dan papan menjadi meningkat. Tetapi penawaran barang-barang ini tidak dapat ditingkatkan dalam jangka waktu pendek lantaran kurangnya faktor pendukung seperti bahan mentah, buruh terlatih, modal dan sebagainya. Biaya dan harga barang-barang tersebut naik,

sehingga biaya hidup rakyat menjadi mahal. Akibatnya standar kehidupan yang rendah itu menjadi lebih rendah. Kemiskinan membiakan bilangan besar anak-anak yang justru semakin memperburuk standar kehidupan penduduk. Lingkaran setan antara kemiskinan dan standar kehidupan yang rendah ini berjalan terus semakin membelit (Jhingan, 2004 dalam Rosyetti, 2009).

Jumlah penduduk bila dikaitkan dengan pertumbuhan *income per capita* suatu negara, secara kasar dapat mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Disamping kedua pendapat ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasionalnya. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau sedikit tetapi juga tidak boleh terlampau banyak (Subri, 2003 dalam Rosyetti, 2009).

Pengaruh pertumbuhan penduduk pada pendapatan perkapita biasanya tidak menguntungkan. Pertumbuhan penduduk cenderung memperlambat pendapatan perkapita dalam tiga cara : (i) memperberat beban penduduk pada lahan; (ii) menaikkan biaya barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka; (iii)

memerosotkan akumulasi modal karena dengan menambah anggota keluarga biaya meningkat. Pengaruh buruk ini akan semakin parah bila persentase anak pada keseluruhan penduduk tinggi. Besarnya jumlah anak-anak diantara jumlah penduduk membawa beban berat dalam perekonomian, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk nasional. Faktor lain adalah harapan hidup yang pendek (Jhingan, 2004 dalam Rosyetti, 2009).

Pertumbuhan penduduk akan berpengaruh cukup besar, terutama dalam hal pendapatan per kapita, standar kehidupan, pembangunan pertanian, lapangan kerja, tenaga buruh, maupun dalam hal pembentukan modal (Sanusi, 2004 dalam Rosyetti, 2009).

6. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Covey (1990) dalam Santoso (2013), bahwa dalam menciptakan manusia yang produktif, kesehatan merupakan hal atau bagian dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Agar kualitas kesehatan masyarakat tetap terjamin pemerintah perlu untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk berbagai keperluan dan hal di bidang kesehatan seperti tenaga medis, obat-obatan, puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya.

Kesehatan merupakan dasar dari produktivitas kerja dan kapasitas belajar di sekolah baik pada tingkat individual maupun keluarga. Tenaga

kerja akan lebih produktif dalam bekerja ketika mereka sehat secara fisik dan mental dibandingkan mereka yang kurang sehat, Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa dan terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat. Sedangkan pada tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang baik merupakan salah satu input penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang (Juanita dalam Arifin, 2015).

Menurut Becker (1975) dalam Saputri (2014), bahwa dengan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik merupakan cara untuk melakukan investasi dalam *human capital*. Di negara-negara Barat, pendapatan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan daripada kekuatan saat ini, namun pada masa lampau dan sampai sekarang, kekuatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan apalagi kesehatan emosional dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam menentukan pendapatan di seluruh dunia. Semakin besarnya kemungkinan masyarakat akan hidup sehat tergantung pada semakin banyaknya pula pemerintah mengeluarkan dana pada bidang kesehatan.

Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat angka harapan hidup, dimana orang

yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2013 dalam Arifin, 2015).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1994) dalam Arifin (2015), bahwa ada dua hal yang membuat orang lebih bahagia dan menjadikan mereka lebih produktif dalam bekerja yaitu dengan pemberantasan penyakit serta perbaikan kesehatan dan gizi. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. (Meier, et al dalam Winarti, 2014). Dapat disimpulkan kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya jika kesehatan buruk atau kurang baik akan berakibat pada perubahan kearah yang kurang baik. Karena tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktivitas.

7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam peningkatan sumber daya manusia pendidikan mempunyai peranan penting. Pertumbuhan ekonomi bangsa dipengaruhi secara penuh oleh pendidikan. Pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas dan fertilitas (angka kelahiran) masyarakat. Dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan.

Jadi, pada umumnya pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu investasi (*human investment*) dalam hal ini, proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi.

Investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang

lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut (Meier, et al dalam Winarti, 2014).

8. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang penting bagi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi (pendapatan perkapita) yang tinggi. Pelaksanaan pembangunan di suatu negara tidak terlepas dari peran serta penduduk. Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan penduduk yang berkualitas, sehingga tujuan pembangunan dapat dengan mudah dicapai. Oleh karena itu, kualitas penduduk perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Kualitas penduduk disuatu negara dapat dilihat dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dihitung

berdasarkan tiga indikator, yaitu : kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.

Jumlah penduduk bila dikaitkan dengan pertumbuhan *income per capita* suatu negara, secara kasar dapat mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Disamping kedua pendapat ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasionalnya. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau sedikit tetapi juga tidak boleh terlampau banyak (Subri, 2003 dalam Rosyetti, 2009).

Salah satu faktor penting dalam suatu proses pembangunan ekonomi di suatu negara adalah pada modal manusianya (*human capital*), dengan kualitas sumber daya manusia yang baik di suatu negara akan menjadikan kinerja ekonomi di negara tersebut tentunya akan lebih baik pula, sejalan yang di ungkapkan oleh Mubyarto (dalam Mirza, 2012), "*social development is economic development*".

Menurut Todaro (1998) dalam Mirza (2012), bahwa yang menjadi faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan

ekonomi dari suatu bangsa adalah sumber daya manusianya (Penduduknya).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Jenis data yang digunakan adalah data panel periode tahun 2006-2009 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan menggunakan metode Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Dan Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto A. Santoso, Abubakar Hamzah, Mohd. Nur Syechalad (2013) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan adalah data panel periode tahun 2005-2010 dari 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian dilakukan menggunakan metode Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota sektor kesehatan dan pendidikan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kedua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terbukti dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap IPM dengan sangat meyakinkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. Jenis data yang digunakan adalah data pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, beserta data Indeks Pembangunan Manusia pada seluruh kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan menggunakan model analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan dana yang besar setiap tahunnya di Sektor Pendidikan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena besarnya Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ternyata masih

belum mampu membantu pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membangun beberapa sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di beberapa tahun belakangan ini sehingga banyak memakan anggaran.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Yuli Arifin (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006 – 2013. Jenis data yang digunakan adalah data panel periode tahun 2006-2013 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan menggunakan metode Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Cliff Laisina, Vecky Masinambow, Wensy Rompas (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap PDRB melalui

Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* periode tahun 2002-2013 Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sedangkan untuk sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan baik secara parsial ataupun secara simultan. IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB baik diuji secara parsial ataupun secara simultan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, baik diuji secara parsial ataupun secara simultan, sedangkan di sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Anindita Budhi Hapsari (2016) dengan judul penelitian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1990-2014. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* periode tahun 1990-2014 Negara Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa anggaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 1990-2014 dan memiliki hubungan yang positif terhadap IPM. Kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 1990-2014 dan memiliki hubungan yang negatif terhadap IPM. PDB memiliki pengaruh

signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 1990-2014 dan memiliki hubungan yang positif terhadap IPM.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
1	Denni Sulistio Mirza (2012) penelitian Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.	Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Pertumbuhan Ekonomi • Belanja Modal • Indeks Pembangunan Manusia 	Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Dan Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.
2	Sugiarto A. Santoso, Abubakar Hamzah, Mohd. Nur Syechalad (2013) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh.	Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan • Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan • Indeks Pembangunan Manusia 	Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota sektor kesehatan dan pendidikan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kedua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terbukti dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap IPM dengan sangat meyakinkan.

No	Penulis, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
3	Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan • Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan • Indeks Pembangunan Manusia 	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan dana yang besar setiap tahunnya di Sektor Pendidikan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena besarnya Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ternyata masih belum mampu membantu pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membangun beberapa sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di beberapa tahun belakangan ini sehingga banyak memakan anggaran.</p>

No	Penulis, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
4	Mochammad Yuli Arifin (2015), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006 – 2013.	Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan • Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan • Pertumbuhan Ekonomi • Indeks Pembangunan Manusia 	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
5	Cliff Laisina, Vecky Masinambow, Wensy Rompas (2015), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013.	Metode Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan • Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan • PDRB • Indeks Pembangunan Manusia 	Sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sedangkan untuk sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan baik secara parsial ataupun secara simultan. IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB baik diuji secara parsial ataupun secara simultan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, baik diuji secara parsial ataupun secara simultan, sedangkan di sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

No	Penulis, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
6	Anindita Budhi Hapsari (2016), Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1990-2014.	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia • Anggaran pemerintah sektor pendidikan • Kemiskinan • PDB 	anggaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 1990-2014 dan memiliki hubungan yang positif terhadap IPM. Kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 1990-2014 dan memiliki hubungan yang negatif terhadap IPM. PDB memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 1990-2014 dan memiliki hubungan yang positif terhadap IPM.

C. Hipotesis

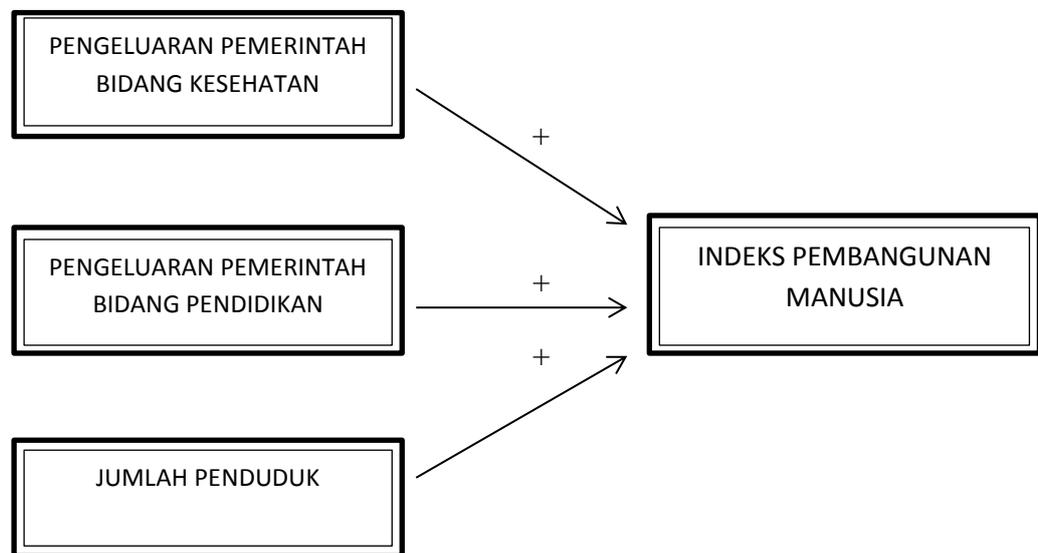
Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, terhadap rumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara anggota OKI kawasan Afrika sub-Sahara.
2. Diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara anggota OKI kawasan Afrika sub-Sahara.

3. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara anggota OKI kawasan Afrika sub-Sahara.

D. Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka pikir penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh variabel yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada **Gambar 2.2** sebagai berikut :



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran